
**MODEL REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF
OLEH PARTAI POLITIK DI DPD PARTAI GOLKAR
KABUPATEN SIDOARJO**

Hendra Sukmana
Arsiyah

(Prodi Ilmu Administrasi Negara – FISIP – Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
email: Hendra_sukmana91@yahoo.co.uk; email arsiyaharsy@yahoo.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena tentang pola rekrutmen calon anggota legislatif DPD Partai Golkar kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data yang berupa data primer dan data sekunder, dengan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola rekrutmen calon anggota legislatif DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo, sudah berjalan dengan baik dan tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan pola rekrutmen calon anggota legislatif pada periode sebelumnya. Dimulai dengan sosialisasi pendaftaran kepada para calon anggota legislatif terhadap seluruh kader. Setelah itu dilanjutkan dengan pendaftaran diri para calon anggota legislatif, mengikuti pelatihan yang telah disiapkan oleh tim Sembilan, kemudian caleg akan diseleksi dengan metode skoring.

Kata kunci : model rekrutmen politik, calon anggota legislatif

**RECRUITMENT MODEL OF LEGISLATIVE
CANDIDATES BY POLITICAL PARTIES**
(Case study of Local Golkar party in Sidoarjo Regency)

ABSTRACT

This research is aimed to study the model of recruitment of prospective members of DPD Golkar Sidoarjo. The method of this research used qualitative approach. This research used data sources in the form of primary and secondary data, along with data collection techniques, namely observation, interview and documentation. The technique of data analysis used descriptive analysis by qualitative approach that includes: reduction of data, presentation of data, drawing a conclusion. The research result indicated that the recruitment of prospective members of DPD Golkar Sidoarjo has run well and was not undergoing many changes compared with the previous model of recruitment of prospective members of the party. It began with socialization of registration to the candidate of legislative member toward the volunteers. After that, it continued with self registration by young members of a legislature, join training prepared by team nine, then the candidates will be selected through scoring method.

Keywords: Political Recruitment Model, Legislative Candidate

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum merupakan cara perekrutan anggota legislatif yang digunakan oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi, menyuarakan pilihannya melalui pemilihan umum untuk menentukan wakilnya yang duduk sebagai anggota dewan.

Dalam konteks sistem politik Indonesia, pemilu merupakan suatu proses substitusi kekuasaan. Undang-undang nomor 08 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur proses tersebut yang kemudian dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena berdasarkan pasal 1 tentang ketentuan umum dari undang-undang tersebut disebutkan bahwa KPU merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilu.

Pencalonan anggota badan-badan legislatif merupakan salah satu proses dan tahap penting dalam pemilihan umum (pemilu), termasuk di Indonesia. dalam praktik pemilu di Indonesia, rakyat pemilih sebagai subyek dalam proses politik dan pihak yang diwakili oleh partai-partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat nasional atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat lokal, acapkali tidak merasa terwakili aspirasi dan kepentingannya oleh para anggota parlemen.

Mewujudkan DPR yang bersih dari korupsi, maka masyarakat harus mengkritisnya sejak partai politik (parpol) melakukan rekrutmen terhadap calon legislatif (caleg) dari pusat sampai daerah. Sebab, dari rekrutmen caleg ini kebersihan dan komitmen parpol anti korupsi itu bisa dilihat, dan nantinya akan berdampak pada DPRD kabupaten Sidoarjo yang diisi oleh 50 orang. Itu penting mengingat dari proses rekrutmen kader caleg tersebut sebagai kunci integritas parpol dalam mewujudkan parpol dan DPRD yang bersih.

Sedangkan di dalam AD/ART Partai Golkar sendiri menyebutkan dalam Bab IV Pasal 5, tentang syarat menjadi kader Partai Golkar yaitu:

1. Kader Partai adalah Anggota yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader dan disaring atas dasar kriteria:
 - a. Mental ideologi;
 - b. Penghayatan terhadap visi, misi, dan platform partai;
 - c. Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PDLT);
 - d. Kepemimpinan;
 - e. Militansi dan mandiri;
2. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dapat menetapkan seseorang menjadi kader partai berdasarkan prestasi yang luar biasa;
3. Ketentuan lebih lanjut tentang kader diatur dalam peraturan organisasi.

Dalam konteks rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik pada pemilu 2004 yang lalu, terdapat kecenderungan sistem rekrutmen tertutuplah yang diterapkan. Hal ini setidaknya bisa kita lihat dari hasil penelitian Haris (2005) yang menjelaskan bahwa pemilihan umum di tengah oligarki partai. Ia sempat mengemukakan bahwa terdapat beberapa kecenderungan dibalik proses pencalonan legislatif lokal, salah satunya adalah proses pencalonan jauh dari prinsip terbuka dan demokratis yang diatur dalam UU pemilu. Masyarakat bahkan tak pernah memperoleh akses dan kesempatan, bukan hanya untuk menjadi caleg, melainkan juga kesempatan untuk ikut menilai kualitas para caleg yang disusun dan diajukan oleh partai politik.

DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo sendiri telah mengalami penurunan dalam jumlah anggota yang menduduki kursi di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Pada periode 2004-2009 terdapat enam orang yang berhasil duduk di kursi DPRD Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan pada periode 2009-2014 anggota legislatif yang berhasil menduduki kursi turun menjadi empat anggota saja, yang ini menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam strategi pemenangan pemilu.

Pemilu yang akan berlangsung tahun 2014, DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo telah memberi target sebanyak sebelas anggota yang akan menduduki kursi di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Hal inilah yang mendorong para pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo untuk mencari strategi baru untuk pemenangan pemilu 2014. Dari uraian latar belakang di atas, muncullah permasalahan mengenai bagaimana model rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh DPD partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Sidoarjo, serta faktor yang mendukung dan menghambat dalam rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh DPD partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan rumusan masalah tersebut terdapat tujuan penelitian ini antara lain memahami fenomena tentang pola rekrutmen calon anggota legislatif DPD Partai Golkar kabupaten Sidoarjo serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh DPD partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Sidoarjo.

LANDASAN TEORETIS

Partai Politik

Budiardjo (2002) mengemukakan partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Salah satu fungsi dari partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik yaitu untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*).

Konsep ideal rekrutmen politik digambarkan sebagai kegiatan merekrut anggota-anggota dari masyarakat dan dari subkultur khusus-komunitas keagamaan, status, kelas, komunitas etnik, dan yang serupa dan melibatkan mereka pada peranan khusus dari sistem politik, melatih mereka dalam kemampuan yang tepat, memberikan mereka dengan peta, nilai, pengharapan, dan pengaruh-pengaruh kognitif politik (Soetomo, 2007).

Model Rekrutmen

1. Model Seligman dan Jacob

Model yang paling sederhana dan paling awal untuk studi perekrutan politik, ditegaskan oleh Seligman yang dikutip oleh Soetomo (2007), rekrutmen terdiri dari: (1) penyaringan dan penyaluran politik yang mengarah pada sifat memenuhi syarat bagi pencalonan; (2) pencalonan yang mana merupakan proses dua tahap, yaitu inisiatif dan penguatan; dan (3) pemilihan (Soetomo, 2007).

Jacob telah memperluas model Seligman dengan menambahkan sifat kepribadian dan posisi relevan perekrutan. Perekrutan awal adalah suatu proses dengan mana individu memiliki sifat kepribadian tertentu dan menempati posisi sosial yang dikhususkan dalam masyarakat yang disaring oleh institusi politik selama pemilihan jabatan. Proses rekrutmen menurut Jacob dapat dilakukan secara “tertutup”, yakni dengan menempatkan organisasi partai politik pada posisi yang kuat untuk mengontrol pada pemilihan kandidat secara “terbuka” dimana partai-partai adalah lemah dan memiliki sedikit kontrol pada pemilihan kandidat (Soetomo, 2007).

2. Model Barber

Menurut Barber ada tiga dimensi (variabel utama) rekrutmen, yaitu: motivasi, sumber daya, dan kesempatan. Dampak mereka adalah kumulatif dan mereka tidak dapat dioperasionalkan secara sendiri-sendiri satu sama lain. Kandidat yang potensial perlu dimotivasi untuk mencari jabatan, tapi berbagai motivasi dapat mengarah pada suatu pencalonan, sumberdayanya dapat terdiri dari aset-aset tersebut seperti fleksibilitas pekerjaan dan kemampuan untuk membuat pengorbanan finansial yang diperlukan; akhirnya, kesempatan membandingkan kompatibilitas dengan kriteria pemilihan dari perwakilan perekrutan dan tingkat ketidakpastian mengenai hasil dari pemilihan (Soetomo, 2007).

Browning (1968), memperkuat model Barber, yang menurutnya perilaku perekrutan ditentukan oleh sindrom motivasional dan pengharapan. Pengharapan diperoleh dalam proses sosialisasi, dan mereka menyalurkan motivasinya pada arena politik, tapi tipe dari para pejabat mencari dan perilaku politikus ditentukan oleh motivasi dominannya.

3. Model Snowiss

Model Snowiss (1966) sebagaimana dikutip oleh Edinger, mengemukakan model perekrutan politik dengan memusatkan dalam aspek-aspek yang relevan terhadap kebutuhan organisasi. Terdapat empat variabel dalam metode ini: (1) dasar sosial, yang mana untuk partai merupakan hal yang utama dibandingkan elektoral umum; (2) sumberdaya organisasi yang dapat digunakan sebagai insentif untuk memobilisasi pekerjaan partai dan menarik para elite politik, material atau

nonmaterial; (3) struktur, hirarki, kepemimpinan tersentral, tidak dapat dipengaruhi oleh dunia luar; (4) etos organisasi. Struktur hirarki dari organisasi partai mempromosikan suatu etos persetujuan politik; partai-partai yang kurang terstruktur mempromosikan orientasi persoalan; dan etos ideologi.

4. Model Rush & Althoff

Menurut Michael Rush dan Philip Althoff model perekrutan politik meliputi lima proses kegiatan yaitu: penyediaan dan permintaan, agensi, kriteria, kontrol, dan tuntutan. Daya penyediaan dan permintaan dipengaruhi oleh berbagai lembaga yang berfungsi sebagai agensi perekrutan politik, kriteria yang mungkin digunakan, dan oleh kadar sejauh mana proses itu dapat dikontrol.

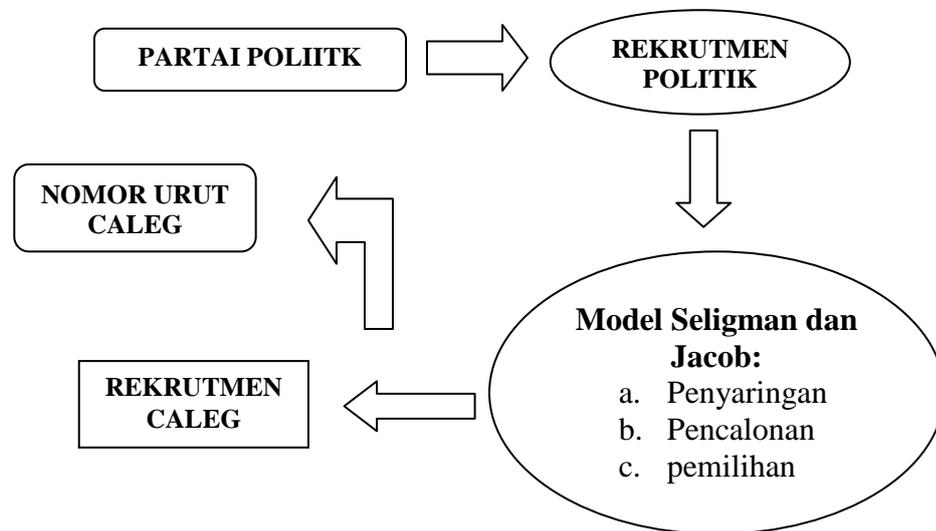
Agensi perekrutan politik menetapkan beraneka ragam kriteria, meliputi ciri-ciri dan keterampilan yang mereka anggap layak dan harus dikuasai oleh calon pejabat yang bersangkutan. Kriteria ini, tentu saja akan mencerminkan permintaan yang merupakan representatif atas tuntutan dan harapan masyarakat, tetapi mereka juga akan mempengaruhi sistem pengadaan, sehingga proses kontrol akan semakin ketat dan kompetitif (Rush & Althoff, 1997).

Rekrutmen Politik di Indonesia

Di masa orde baru rekrutmen politik di Indonesia pada dasarnya sangatlah tertutup. Hal ini terjadi karena dominannya lembaga kepresidenan. Siapa yang akan menjabat apa, kapan, dan di mana, sama sekali tidak melibatkan anggota masyarakat. Proses rekrutmen sering kali didasarkan pada dasar *patronage* politik, bukan atas dasar kapasitas dan kepemimpinan. Akibatnya, tidak jarang kepemimpinan orang yang memegang jabatan mendapat resistensi dari masyarakat, karena yang memegang jabatan bukanlah orang yang memiliki kecakapan atau kemampuan yang diperlukan untuk jabatan tersebut. Hal ini terlihat sekali, misalnya dalam jabatan pimpinan partai politik, siapa yang menjadi ketua partai politik bukanlah seseorang yang memiliki basis dukungan massa yang kuat, tetapi yang mendapatkan dukungan dari kalangan pemerintah (Gaffar, 1999).

Demikian juga rekrutmen di tingkat lokal, dalam proses pemilihan gubernur/kepala daerah, masyarakat di daerah tidak mempunyai kapasitas untuk ikut menentukan. Karena biasanya siapa yang akan menjadi gubernur ditentukan oleh kekuatan yang berada di pusat pemerintahan. Pada masa reformasi perubahan ini tidak terlalu signifikan, politik *patronage* masih terasa kental. Satu perubahan yang paling menonjol dalam rekrutmen politik di era reformasi adalah bukan terletak pada dominannya lembaga kepresidenan, akan tetapi terletak pada dominannya ketua partai penguasa.

Gambar 1.
Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitiannya ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki (Moleong, 2005; Arikunto, 2006). Penelitian ini dilakukan di kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo. Dengan nara sumber ketua DPD Partai Golkar, para calon anggota legislatif, dan pengamat politik. Sedangkan teknik pengumpulan datanya meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Perekrutan Calon Anggota Legislatif DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo

Strategi merupakan keharusan dalam menjalankan suatu program partai, karena untuk menjalankan program serta merealisasikannya, maka dibutuhkan format strategi khusus yang matang agar apa yang menjadi target dan tujuan program tersebut dapat benar-benar tercapai.

Model rekrutmen politik yang sesuai dan diterapkan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo adalah model Seligman dan Jacob. Model ini

merupakan model yang paling sederhana dan paling awal untuk studi perekrutan politik. Ditegaskan oleh Seligman (1961), bahwa rekrutmen politik terdiri dari (1) penyaringan dan penyaluran politik yang mengarah pada sifat memenuhi syarat bagi pencalonan; (2) pencalonan-yang mana merupakan proses dua tahap, yaitu inisiatif dan penguatan; dan (3) pemilihan.

Jacob (1962) telah memperluas model Seligman dengan menambahkan sifat kepribadian dan posisi relevan perekrutan. Perekrutan awal adalah suatu proses dengan mana individu memiliki sifat kepribadian tertentu dan menempati posisi sosial yang dikhususkan dalam masyarakat yang disaring oleh intitusi politik selama pemilihan jabatan. Proses rekrutmen menurut Jacob dapat dilakukan secara “tertutup”, yakni dengan menempatkan organisasi partai politik pada posisi yang kuat untuk mengontrol pada pemilihan kandidat secara “terbuka” di mana partai-partai adalah lemah dan memiliki sedikit kontrol pada pemilihan kandidat (Czudnowski dalam Soetomo, 2007).

Salah satu bentuk model dalam perekrutan calon anggota legislatif adalah diutamakan para pengurus partai Golkar itu sendiri baik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kabupaten maupun pimpinan kecamatan, serta pengurus organisasi yang mendirikan dan didirikan partai Golkar (Hasta Karya) tapi tidak menutup kemungkinan bagi siapa saja yang memiliki massa banyak dan berkeinginan menjadi calon anggota legislatif.

“Mengisi formulir kesediaan yang sebelumnya telah ditawarkan ke kader. Kan kita ada HASTA di Golkar. HASTA itu adalah yang didirikan atau mendirikan Partai Golkar. Kalau dari internal meliputi pengurus DPD dan pengurus kecamatan. HASTA KARYA itu meliputi MKGR, KOSGORO, AMPI, GAKARI, dll itu adalah dari internal. Kita tidak mengambil dari independen (dari luar). jadi hanya mengambil dari pengurus DPD, pengurus kecamatan dan pengurus HASTA KARYA”.
(hasil wawancara dengan caleg partai Golkar Abdul Qodir: 28 April 2013).

Bahwa kuota anggota DPRD kabupaten Sidoarjo berjumlah 50 yakni batas maksimal caleg dalam setiap partai politik dan itu sudah ditentukan oleh KPUD Sidoarjo. Maka susunan ideal calon anggota legislatif dari DPD Partai Golkar kabupaten Sidoarjo seharusnya adalah 12 calon anggota legislatif dari organisasi yang didirikan atau mendirikan partai Golkar (hasta karya), 18 calon anggota legislatif dari pimpinan kecamatan dan sisanya 20 calon anggota legislatif dari struktural kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Golkar kabupaten Sidoarjo.

Pelaksanaan Model Perekrutan Calon Anggota Legislatif

Bentuk implementasi strategi model di atas bervariasi, akan tetapi secara umum pada dasarnya bentuk implementasi dari strateginya adalah sosialisasi kepada seluruh elemen kepengurusan di structural partai Golkar kabupaten Sidoarjo dari tingkat kepengurusan kabupaten sampai tingkat kepengurusan kecamatan serta organisasi sayap beserta organisasi yang mendirikan dan yang didirikan oleh partai Golkar (Hasta Karya) dan kesemuanya disosialisasikan di Pimpinan Kecamatan masing-masing. Sehingga harapannya apa yang telah ditargetkan partai tentang strategi perekrutan calon anggota legislatif tersebut benar-benar tercapai.

“Untuk mencapai target strategi tersebut, maka pihak pengurus partai akan melakukan sosialisasi kepada semua pengurus DPD, pengurus pimpinan kecamatan, dan organisasi yang mendirikan dan didirikan partai Golkar (hasta karya). Kemudian di seleksi oleh tim 9 (sembilan) untuk memilah dan memilih mana calon yang layak dan mana yang tidak layak”.

(hasil wawancara dengan caleg partai Golkar Ainun Nasik, SH: 02 mei 2013)

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Golkar Kabupaten Sidoarjo sudah mempersiapkan tim 9 (yang terdiri dari ketua dan sebagian besar pengurus harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) meliputi sekretaris dan wakil ketua partai Golkar kabupaten Sidoarjo untuk menjaring calon anggota legislatif yang dianggap layak dan sesuai dengan PDLT pada partai Golkar dan dianggap dapat memenangkan dan meraup suara yang banyak di pemilu legislatif. Dan tim 9 ini melakukan sosialisasi kepada calon anggota legislatif sehingga mencapai target yaitu sebanyak 50 orang pendaftar sebagai calon anggota legisaltif dari DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo.

Kriteria Calon Anggota Legislatif

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, BAB VII, Bagian Kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pasal 51 syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia.
-

5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.
6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
8. Sehat jasmani dan rohani.
9. Terdaftar sebagai pemilih.
10. Bersedia bekerja penuh waktu.
11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
14. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu.
15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Dasar pemikiran tentang persyaratan yang sangat sederhana tersebut adalah bahwa partai tidak ingin memberatkan bagi para peserta pencalegan pemilu tahun 2014. Karena gagasan DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo pada periode kali ini hanya menegaskan bahwa calon wakil rakyat yang akan diusung nanti harus benar-benar merakyat sesuai dengan tema yang diusung oleh pimpinan pengurus di DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo “suara Golkar suara rakyat”.

Artinya bawasanya apa yang disuarakan oleh calon atau anggota legislatif dari partai Golkar merupakan suatu keterwakilan dari suara hati nurani rakyat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Perekrutan Calon Anggota Legislatif di DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo

Beberapa faktor pendukung yang dapat mempelancar dalam proses perekrutan calon anggota legislatif di DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo. Diantaranya yaitu dalam Perekrutan calon anggota legislatif, partai Golkar mengambil dari semua kader yang sudah ada di struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo serta pengurus di tingkat kecamatan (PK) dan di dalam ormas yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar (Hasta Karya).

Di samping itu adanya kesadaran diri pada setiap kader untuk selalu ingin turut andil dalam membesarkan dan memperjuangkan Partai Golkar terutama dalam hal ini Partai Golkar Sidoarjo, karena Partai Golkar merupakan partai yang merakyat, dalam artian partai yang ingin memperjuangkan aspirasi rakyat. Selain itu, Partai Golkar merupakan salah satu partai besar yang perolehan suaranya selalu tinggi di setiap pemilu legislatif dan sudah dikenal oleh masyarakat luas, sehingga banyak masyarakat luas dalam hal ini adalah para kader Golkar yang berminat untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo. Karena kebesaran partai berlambang beringin inilah sehingga masyarakat luas dalam hal ini adalah para kader Partai Golkar akan berfikiran bahwa dengan menjadi calon anggota legislatif dari Partai Golkar presentasi untuk menjadi anggota DPRD kabupaten Sidoarjo akan menjadi lebih besar.

Dalam Perekrutan calon anggota legislatif di DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo, juga terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam proses Perekrutan anggota legislatif partai tersebut. Akan tetapi dengan adanya hambatan tersebut bukan berarti Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo tidak bisa berjalan dengan lancar dan sesuai sesuai target yang telah ditentukan. Akan tetapi hambatan tersebut dijadikan Partai Golkar sebagai acuan untuk menambah semangat dalam menjalankan proses demi terwujudnya tujuan dari partai Golkar. Diantara beberapa hambatan yang dapat memperlambat proses perekrutan calon anggota legislatif di DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo:

1. Adanya pengunduran diri
 2. Tidak mau mendapatkan nomor urut bawah
 3. Kesulitan pemenuhan kuota 30% calon anggota legislatif perempuan.
-

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Hasil penelitian penulis, sebagaimana yang telah disebutkan pada bab-bab terdahulu, maka penulis berkesimpulan bahwa model rekrutmen calon anggota legislatif DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan model rekrutmen politik Seligman dan Jacob. Dimulai dengan sosialisasi pendaftaran, Setelah itu dilanjutkan dengan pendaftaran diri para calon anggota legislatif. Kemudian calon anggota legislatif yang sudah mendaftarkan diri tersebut mengikuti pelatihan yang telah disiapkan oleh tim sembilan yang berlangsung selama beberapa bulan. Setelah mekanisme penjaringan selesai maka nama-nama yang lolos dalam penjaringan akan dibawa kesidang pleno guna menentukan nomor urutnya. Dan yang terakhir yaitu para calon anggota legislatif yang telah mendapatkan nomor urut tersebut didaftarkan ke KPU.

2. Saran

Adapun saran penulis terhadap DPD (Dewan Pimpinan Daerah) partai Golkar kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut: komunikasi antara pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo dengan para calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Sidoarjo harus tetap dijaga dan intens. Pengurus DPD Partai Golkar kabupaten Sidoarjo disaeankan mempertahankan model rekrutmen caleg yang telah ada saat ini dan terus menumbuhkan kesadaran pada diri kader bawasanya partai Golkar adalah partai politik besar yang memperjuangkan aspirasi rakyat dilakukan pula terobosan-terobosan baru dalam hal strategi yang bisa memperkuat partai demi kemenangan pemilu yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiarjo, Miriam. (2002). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fadillah Putra. (2004). *Partai Politik & Kebijakan Publik*. Malang: Pustaka Pelajar Offset.
- Gaffar, Afan. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haris, Syamsuddin. (2005). *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
-

Rush, Michael & Althoff, Philip. (1997). *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soetomo. (2007). *Perilaku Organisasi & Rekrutmen Politik*. Jakarta: Prenada.

_____. (2007). *Perilaku Politik Legislatif*. Jakarta: Prenada.

Moleong. J. Lexy. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
